

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu ***"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"***

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan

dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sector perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel 4.1.
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	OPD
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,66	DISKOMINFO SETDA
					Indeks Profesionalitas ASN	59	BKPSDMD BAPPEDA SETWAN SETDA DKP
					Nilai SAKIP	BB	SETDA BAPPEDA INSPEKTORAT
					Indeks persepsi anti Korupsi	3,73	BPKAD INSPEKTORAT
					Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	DPMPTSP DKPS KECAMATAN
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	75%	SATPOL PP
			Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	DISDAMKAR
		Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	BKBP
				Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	BKBP
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	70,61	DPUPR DISHUB DPRKP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	38,5	DLH
				Indeks Kualitas Udara	80,74	DLH	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,00	DLH	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	OPD
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	68	DPP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	91,5	DPKP
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,39%	DPK
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	BPPRD
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	474,62 M	DPMPTSP
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,50%	DTKK
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,01%	DTKK
					Persentase Daya Saing Produk IKM	6,5	DPP
					Persentase koperasi berkualitas	23,85%	DTKK
				5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,62	DISDIK DKP				
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	12,32	DISDIK				
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,70	DISDIK				
Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,03	DPPKB				
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,69%	DPPKB				
Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,93				DPMPPA
		Indeks Pemberdayaan Gender	68,30				DPMPPA
Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	90%				DPMPPA
Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	63				DPMPPA
		Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	51	DISPORA		
Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	75	DINSOS			

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2021 adalah “Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi”.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.

4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 adalah sebesar 6,0%. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2015-2020): “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2021, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7 persen Inflasi secara nasional dibawah 4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,9-7,2 persen, Jawa-Bali 5,6-6,2

persen, Nusa Tenggara 4,7-7,5 persen, Kalimantan 5,7-8,3 persen, Sulawesi 6,9-8,8 persen, Maluku 6,2-9,1 persen Papua 5,4-9,0 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
		Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat		
		Mendorong pembangunan Gender		
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3%
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana	Share Sektor Sekunder	21,5%
		Peningkatan nilai tambah industri pengolahan	Total Factor Productivity	1.
		Meningkatkan nilai tambah jasa produktif		
		Menumbuh kembangkan riset teknologi untuk komoditas unggulan		
3	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan	Jalan provinsi dalam kondisi mantap	78,93%
		Memperluas akses terhadap air minum layak	Akses terhadap air minum layak	75%
		Memperluas akses terhadap sanitasi layak	Akses terhadap sanitasi layak	75%
		Meningkatkan rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	95%

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Ketersediaan Energi	1.
		Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat		
		Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran	Peningkatan Pemanfaatan EBT	1.
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Meningkatkan tata kelola layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Meningkatkan akuntabilitas	Indeks Demokrasi Indonesia	77
		Meningkatkan kemampuan ASN		
		Meningkatkan kamtibmas		

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2021 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan system manajemen logistic kebencanaan
		2. Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
		3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
		4. Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
		5. Menyiapkan program padat karya perbaikan lingkungan dan permukiman

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan minat baca masyarakat dan peningkatan pengelolaan kearsipan daerah 2. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas 4. Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga 5. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga 3. Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi 4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis 5. Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local 6. Meningkatkan partisipasi dan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan 7. Memperkuat akses pemenuhan hak anak 8. Meningkatkan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 9. Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS 10. Meningkatkan Pengendalian ketersediaan, distribusi bahan pangan dan juga keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan 11. Mendorong percepatan rekonstruksi dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya 2. Mengembangkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>) 3. Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
5	Good Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK 2. Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN 3. Memperkuat Akuntabilitas kinerja keuangan daerah 4. Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan pengawasan pembangunan secara

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
		komprehensif, transparan dan akuntabel
		6. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama untuk memperkuat potensi dan kapasitas daerah
		7. Memperkuat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
		8. Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta efektivitas fasilitasi orkemas dan parpol
		9. Mengoptimalkan pendapatan daerah

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI	KOTA
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
Penyederhanaan Regulasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Good Governance
Penyederhanaan Birokrasi	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	
Transformasi Ekonomi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
		Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah